

PENATAAN KELOMPOK PETANI HUTAN DALAM MELAKSANAKAN AGROFORESTRI UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELESTARIAN HUTAN DI KECAMATAN PANTI KABUPATEN PASAMAN

Aldio Surya Dirga¹

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, Indonesia

Abstrak: Agroforestri dilaksanakan dengan tujuan untuk memberdayakan kelompok petani hutan yang sejalan dengan pelestarian hutan. Pengelolaan kawasan hutan harus dilaksanakan dengan metode yang benar agar efektif dan efisien, serta mencegah risiko bencana alam akibat kerusakan alam. Penelitian ini berfokus pada permasalahan yang dihadapi petani dalam melaksanakan agroforestri, penataan yang dibutuhkan kelompok tani hutan dalam kegiatan agroforestri di Kecamatan Panti, serta usaha yang dilakukan oleh kelompok tani hutan untuk menjalankan usaha sambil melindungi kawasan hutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dalam penelitian ini terlihat bahwa kegiatan agroforestri belum optimal dan membutuhkan penataan kelompok tani dengan tujuan memberdayakan Kelompok Tani Hutan agar mandiri, produktif, dan sejahtera serta menjaga kelestarian hutan Lindung di Kecamatan Panti. Penataan berfokus pada penata kelembagaan, penatalaksanaan, dan penata manajemen.

Kata Kunci : Agroforestri, Pemberdayaan Masyarakat, Penataan Kelompok Tani

Abstract: *Agroforestry is implemented with the aim of empowering forest farmer groups in line with forest conservation. Forest area management must be implemented with the correct method to be effective and efficient, and prevent the risk of natural disasters due to environmental damage. This study focuses on the problems faced by farmers in implementing agroforestry, the arrangements needed by forest farmer groups in agroforestry activities in Panti District, and the efforts made by forest farmer groups to run their businesses while protecting forest areas. This study uses a descriptive research method and the data collection techniques used are interviews, documentation, and observation. In this study it is seen that agroforestry activities are not optimal and require the arrangement of farmer groups with the aim of empowering Forest Farmer Groups to be independent, productive, and prosperous and maintain the sustainability of protected forests in Panti District. The arrangement focuses on institutional, administration, and management.*

Keywords : *Agroforestry, Community Empowerment, Organisation of Farmers' Groups*

I. Pendahuluan

Hutan menjadi pusat kehidupan dan penghidupan bagi seluruh makhluk hidup yang perlu dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keberlangsungan kehidupan. Peran hutan sebagai pusat kehidupan adalah hutan mampu menjaga keamanan dan kenyamanan dengan cara memberikan oksigen dan air bagi semua makhluk hidup serta melindungi dari bencana banjir dan longsor. Pemanfaatan kawasan hutan yang tidak bijaksana menimbulkan

perusakan hutan dan semakin berkurangnya kawasan hutan akibat pembukaan lahan. Faktor aktivitas manusia misalnya pembangunan jalan dan perumahan serta pembukaan lahan untuk dijadikan objek pariwisata atau hutan yang dikelola dan digunakan masyarakat untuk pertanian atau perkebunan berkontribusi dalam merusak kawasan hutan (Dirga & Djafar, 2023). Hal ini berbanding lurus dengan semakin sedikitnya kapasitas serap air. Perubahan cuaca ekstrim menjadi faktor lain penyebab semakin banyaknya daerah yang mengalami banjir dan longsor.

Pemanfaatan hutan sebagai pusat penghidupan yaitu manusia bisa menjadikan hutan untuk tempat aktivitas yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Peningkatan pertumbuhan penduduk yang tidak berbanding lurus dengan penambahan lapangan pekerjaan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Kesulitan tersebut memberikan inisiatif masyarakat untuk mencari alternatif lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan lahan hutan. Pemanfaatan kawasan hutan memberi peluang akses masuk dalam kawasan hutan dan memanfaatkan hasil hutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat (Golar, G., Muis, H., & Ali, 2017). Pemanfaatan hutan dilaksanakan menggunakan sistem agroforestri dengan cara optimalisasi penggunaan lahan, dengan menggabungkan tanaman berkayu, tanaman pertanian, ternak dan elemen lainnya dalam satu area sebagai upaya meraih manfaat ekonomi, ekologi, dan sosial yang beragam (Ariandi, 2023).

Secara konseptual, Agroforestri merupakan pengelolaan hutan menjadi hutan produktif tetapi tidak merusak hutan. Tetapi secara pelaksanaannya, metode agroforestri juga perlu untuk kawal dan diawasi agar seluruh anggota kelompok melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Agroforestri memberikan dampak positif dalam pengawasan hutan karena kegiatan tersebut memberikan akses kepada masyarakat untuk beraktivitas sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan hutan dengan cara memantau keadaan hutan, mencegah penebangan hutan secara liar serta menjaga kelestarian hutan. Agroforestri menjalankan peran penting dalam menjaga lingkungan dengan mengintegrasikan pohon, tanaman, dan ternak untuk meningkatkan penyerapan karbon dan meningkatkan ketahanan ekosistem (Sharma 2025). Tetapi program tersebut juga bisa berdampak negatif ketika pemanfaatan hutan dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai aturan dan keilmuan. Petani perlu dibekali pengetahuan dan pendalaman tentang metode yang tepat dalam mengelola dan memberdayakan kawasan hutan. Metode agroforestri sudah mulai diterapkan secara luas di berbagai wilayah Indonesia, misalnya Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan,

dan Jawa Barat, dengan luasan kumulatif mencapai lebih dari 600.000 hektar selama periode studi (Masthurri & Muslih, 2023).

Kecamatan Panti di Kabupaten Pasaman dikelilingi oleh kawasan hutan. Masyarakat membentuk kelompok tani agar pengelolaan kawasan hutan lebih terstruktur, tersistematis dan produktif bagi masyarakat sekitar. Kelompok tani hutan sudah mulai mengurus legalitas organisasinya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015. Kelompok tani tersebut pernah dilaporkan sebagai aktivitas ilegal karena beraktivitas sebelum izin usahanya keluar. Pengurusan izin tersebut memang cenderung panjang karena perlu dilaksanakan analisis dampak lingkungan dari kementerian lingkungan hidup serta surat pernyataan tidak mengganggu masyarakat sekitar tempat usaha dan izin dari tetua adat. Izin tetua adat diperlukan karena keputusan tetua adat merupakan hasil aspirasi dari masyarakat yang didiskusikan dan dimusyawarahkan dengan segala pertimbangan baik dan buruknya untuk masyarakat, adat dan lingkungannya. akhirnya proses yang panjang dalam pengurusan izin tersebut terselesaikan pada tanggal 14 maret 2017 diterbitkan SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memberikan izin kepada Kelompok Tani Hutan Harapan Jaya Batu Hampar untuk mengelola dan memanfaatkan hutan kemasyarakatan seluas 102 Hektare di Nagari Panti Kecamatan Panti. Salah satu tantangan utama pasca pemberian izin perhutanan sosial di Kelompok Tani adalah menciptakan sistem kelembagaan yang solid dan mampu menjalankan pengelolaan hutan yang berkelanjutan (Diny et al., 2025).

Kelompok tani dalam pelaksanaan agroforestri sering kali menghadapi permasalahan. Ada permasalahan yang berkaitan dengan kelembagaan yaitu kapasitas kelompok tani belum mandiri dalam menjalankan usaha agroforestri dan hanya bergantung pada bantuan. Kelompok tani tidak mendapatkan banyak kegiatan penyuluhan yang menghambat transfer pengetahuan mengenai tata kelola teknis agroforestri kepada anggota kelompok, serta belum melengkapi administrasi kelompok. Ketidaklengkapan administrasi tersebut disebabkan karena pengurus dan anggota belum mengetahui dan mengenal lebih detail mengenai administrasi (Zahra, Salwa Azuma and Pratama, Agief Julio and Situmeang, 2024)

Kelompok tani juga mengalami kendala bidang manajemen yaitu belum memiliki kemandirian keuangan karena tidak adanya iuran kelompok dan modal internal membuat kelompok tani sulit membiayai operasional atau menebus pupuk bersubsidi. Manajemen pemasaran kelompok tani masih kesulitan mendapatkan target pasar yang menyebabkan posisi tawar petani rendah di hadapan pedagang perantara. masih menghadapi hambatan seperti akses pasar yang terbatas, kurangnya visibilitas nasional, dan pemahaman yang minim tentang pemasaran modern (Hardinata et al., 2025). Kelompok tani juga perlu diberikan sosialisasi dan

pelatihan membangun kemitraan dengan sesama pelaku usaha serta memfasilitasi masyarakat memasarkan hasil produksinya hingga keluar kota sehingga memudahkan kelompok tani memperluas wilayah pemasarannya (Prihatini, Elungan, et al., 2022).

Permasalahan pada sektor tata kelola yaitu kesulitan pengurus kelompok tani dalam hal pelaporan tertulis dan evaluasi berkala membuat proses akuntabilitas kegiatan masih lemah. Kelompok tani juga belum memiliki standarisasi tata kelola dalam pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) sehingga hasil hutan bukan kayu (HHBK) dalam sistem agroforestri belum produktif dan efektif.

Penataan kelompok tani perlu dilakukan agar pelaksanaan agroforestri agar sesuai dengan ketentuan, efektif, produktif sehingga memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan anggota kelompok dan kelestarian hutan. Penelitian ini berfokus pada permasalahan yang dihadapi petani dalam melaksanakan agroforestri, penataan yang dibutuhkan kelompok tani hutan dalam kegiatan agroforestri di Kecamatan Panti, serta usaha yang dilakukan oleh kelompok tani hutan untuk menjalankan usaha sambil melindungi kawasan hutan.

II. Kajian Pustaka

1. Pengelolaan Hutan

Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Waskitho, 2022). Pelestarian kawasan hutan bisa dilaksanakan dengan cara melibatkan masyarakat untuk melaksanakan upaya menjaga ekosistem hutan sebagai upaya pencegahan bencana alam berupa banjir dan longsor yang bisa merugikan masyarakat secara materi maupun nyawa. Pemeliharaan kawasan hutan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 adalah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dijelaskan bahwa pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dijelaskan bahwa Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) perlu dibentuk untuk mengelola hutan, yang menjadi bagian penguatan sistem yang mengurus, mengelola dan melestarikan hutan. Organisasi KPH bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan Hutan, meliputi:

- a. perencanaan pengelolaan;
- b. pengorganisasian;

- c. pelaksanaan pengelolaan; dan
- d. pengendalian dan Pengawasan.

Hutan lindung memiliki ketentuan pengelolaan dan pemanfaatannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, yaitu:

1. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
2. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
3. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam;
4. tidak merusak lingkungan;
5. keseimbangan unsur-unsur hanya memungut Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang sudah tersedia secara alami dan/atau hasil rehabilitasi; dan
6. memungut HHBK sesuai jumlah, berat, atau volume yang diizinkan.

Kelompok petani bisa mengelola hutan dan mendapatkan Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berupa: rotan, madu, getah, buah, biji, jamur, daun, bunga, sarang burung walet; dan/atau HHBK lainnya. Kriteria keberhasilan Pengelolaan Hutan Lestari menurut ITTO (*International Tropical Timber Organization*), yaitu:

- Kelestarian fungsi ekologis (tanah, air, keanekaragaman hayati)
- Keberlanjutan produksi hasil hutan
- Manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat
- Kelembagaan dan kebijakan yang efektif

FAO (*Food and Agriculture Organization*) memiliki kriteria keberhasilan Pengelolaan Hutan Lestari yang sedikit berbeda, yaitu:

- Terjaganya sumber daya hutan
- Terpenuhinya fungsi produksi
- Terlindunginya fungsi perlindungan lingkungan
- Terjaminnya fungsi sosial hutan
- Adanya kerangka hukum dan tata kelola yang baik

Penulis membuat kesimpulan mengenai tolak ukur keberhasilan pengelolaan hutan lestari berdasarkan kedua pendapat tersebut, yaitu:

1. Kelompok Petani harus memperhatikan tata kelola dan tata lembaga agar kegiatan pengelolaan hutan tersistematis dan terstruktur.
2. Hutan dikelola dengan program yang memperhatikan perlindungan dan pelestarian hutan.

3. Hutan dikelola dengan produktif dan memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Pengelolaan hutan harus direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sesuai dengan program yang sudah dibuat dan disepakati. Petani harus melaksanakan kegiatan yang tidak memberi dampak buruk pada ekosistem hutan. Petani bisa memperoleh hasil hutan lindung berupa hasil hutan bukan kayu, karena tidak boleh mengurangi, mengubah dan menghilangkan fungsi utama hutan. Hasil hutan yang diperoleh dari pengelolaan hutan lindung di Kecamatan Panti adalah kopi, madu, dan ikan larangan. Ikan larangan dibuka bebas untuk umum dalam periode waktu tertentu. Penduduk dipersilahkan untuk menangkap ikan menggunakan jala atau tangan kosong, hasil tangkapan bisa dikonsumsi beramai-ramai dan sebagian akan dijual untuk kepentingan bersama.

2. Agroforestri

Agroforestri merupakan rangkaian aktivitas pengelolaan hutan dengan pemberdayaan masyarakat karena usaha masyarakat dalam agroforestri juga bisa seiring sejalan dengan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan hutan. Agroforestri menjadi metode pemanfaatan sumber daya yang ada di hutan tanpa merusak hutan, sehingga hutan bisa terjaga dan dapat dirasakan oleh generasi selanjutnya. Agroforestri merupakan metode pertanian dengan menggabungkan tanaman hutan dengan tanaman pertanian dan/atau peternakan pada lahan yang sama. Integrasi tanaman bernilai ekonomi tinggi seperti kopi dan coklat di bawah pohon besar menjadi penghasilan yang berkelanjutan bagi masyarakat tanpa harus merusak pohon utama.

Agroforestri di kawasan hutan juga berfungsi sebagai koridor ekologis yang menjaga keanekaragaman hayati sambil memulihkan fungsi hidrologi tanah melalui sistem perakaran yang beragam antara tanaman kehutanan dan tanaman semusim. Sistem wanatani (agroforestri) pada lahan hutan negara terbukti mampu menurunkan laju erosi hingga 40-60% dibandingkan dengan lahan pertanian monokultur, karena adanya tutupan tajuk berlapis yang memecah energi kinetik air hujan. Agroforestri akan memberikan dampak positif bagi ekosistem hutan karena meningkatkan sifat fisik tanah, seperti kepadatan bulk yang lebih baik dan kapasitas penyerapan air yang lebih tinggi, yang berkontribusi pada kesuburan tanah secara keseluruhan.

Transformasi lahan hutan menjadi sistem agroforestri yang terkelola dengan baik merupakan solusi saling menuntungkan untuk mengatasi konflik antara pemerintah dan masyarakat adat/lokal karena agroforestri bisa memenuhi kebutuhan masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agroforestri di

lahan hutan kemasyarakatan meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga sebesar **25%** melalui penyediaan hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti buah-buahan, madu, dan tanaman obat.

Keberhasilan agroforestri dalam program Perhutanan Sosial sangat bergantung pada penguatan kelembagaan kelompok tani hutan (KTH) dalam mengakses pasar dan modal. Hal yang perlu ditata berkaitan dengan penguatan kelembagaan adalah penataan struktur organisasi, penataan tugas dan fungsi serta penataan program kerja. Penataan struktur organisasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kegiatan organisasi. Penataan struktur organisasi merupakan langkah awal penguatan kelembagaan, karena penataan struktur organisasi akan memperjelas pembagian tugas, wewenang, program kerja dan tanggung jawab dalam organisasi. Penataan kelembagaan juga berkaitan dengan program kerja organisasi.

3. Penataan

Agroforestri bisa menjadi solusi bagi pemanfaatan hutan dan menciptakan lapangan pekerjaan masyarakat. Program agroforestri memerlukan penataan agar berjalan sesuai harapan dan memudahkan mencapai tujuan. Berdasarkan kriteria keberhasilan pengelolaan lestari perlu dilaksanakan penataan berupa tata lembaga dan tata kelola. Penataan kelembagaan dilaksanakan agar kelompok petani memiliki lembaga yang solid, terstruktur dan sistematis. Melalui penataan lembaga, kelompok tani bisa memiliki struktur kepengurusan dan pembagian tugas yang jelas. Dalam penataan kelembagaan juga harus dibuat program kerja sehingga kegiatan yang dilaksanakan tersistematis dan terukur. Program kerja sebaiknya dibuat dengan tujuan kesejahteraan kelompok tani dan pelestarian hutan. Hal yang perlu diatur dalam program kerja diantaranya adalah rencana kegiatan, manajemen risiko, dan kompetensi petani. Penulis membuat konsep penataan lembaga pada program agroforestri dengan menggabungkan teori kelembagaan menurut Uphoff (1986) yang berfokus pada penataan pada bagian internal kelembagaan yang relevan untuk penguatan kelompok tani dengan teori kelembagaan menurut Grindle (1996) yang berfokus pada penataan pada bagian eksternal kelembagaan dan melaksanakan amanat kebijakan pemerintah.

Tata kelola agroforestri perlu diatur dengan tujuan memperjelas arah, kebijakan, prinsip organisasi dan program kegiatan. Menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara), terdapat 6 indikator tata kelola, yaitu:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban perencanaan, pelaksanaan, dan hasil program, termasuk penggunaan anggaran, bantuan bibit, dan sarana produksi.

2. Transparansi

Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai mekanisme program, kriteria penerima, jenis bantuan, dan alokasi anggaran agroforestri.

3. Kepastian Hukum

Kepastian Hukum berkaitan dengan kejelasan hak dan kewajiban petani dalam pengelolaan lahan agroforestri, termasuk izin kelola, aturan pemanfaatan hasil hutan, serta perlindungan hukum bagi petani.

4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi petani dalam agroforestri dilaksanakan secara langsung dalam proses pembangunan dan pembuatan keputusan pemberdayaan. Sehingga masyarakat dapat mengutarakan keinginan mereka dan terjalin komunikasi 2 arah antara pemerintah dan masyarakat (Fada, 2022). Petani bisa menyampaikan permasalahan yang dihadapi dan kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan. Petani dapat aktif dalam perencanaan pola tanam, pengambilan keputusan kelompok, pelaksanaan kegiatan, serta pengawasan dan evaluasi program agroforestri.

5. Efektivitas dan Efisiensi

Program agroforestri mampu meningkatkan pendapatan dan kapasitas petani dengan penggunaan sumber daya (anggaran, tenaga, waktu) secara optimal dan tepat sasaran.

6. Profesionalisme

Program agroforestri harus dikelola secara profesional agar bisa terlaksana secara berkelanjutan. Profesionalisme bisa dilihat dari kompetensi teknis, sikap responsif, dan integritas.

7. Keadilan

Agroforestri perlu dikerjakan dengan pembagian tugas yang merata dan pembagian hasil yang adil. Hal ini bisa mencegah kecemburuan sosial yang berpotensi merusak organisasi dan program agroforestri.

8. Responsivitas terhadap kebutuhan lokal

Sebuah lembaga dan program bisa tetap bertahan ketika mampu memberikan respon yang tepat terhadap kebutuhan organisasi. Respon yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang tepat sehingga berhasil memberikan solusi yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan tersebut. Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap kebutuhan karena kebutuhan cenderung berkembang sesuai pengetahuan dan pelaksanaan di lapangan.

Penulis menganggap bahwa manajemen agroforestri juga perlu ditata untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya agar pencapaian tujuan bisa lebih efektif. Menurut Terry (1953), manajemen merupakan proses pengelolaan sumber daya, yaitu:

1. *Man* (Manusia)
Penataan sumber daya manusia yang menjalankan seluruh aktivitas organisasi. penataan manusia meliputi kemampuan, keterampilan, motivasi, dan integritas
2. *Money* (Uang)
Sumber daya keuangan perlu ditata karena keuangan digunakan untuk membiayai kegiatan organisasi. Keuangan harus dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel
3. *Methods* (Metode)
Metode merupakan cara, prosedur, atau sistem kerja yang digunakan suatu organisasi. Indikator yang digunakan pada metode adalah SOP, teknik kerja, dan mekanisme pelaksanaan sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana, terstruktur, sistematis dan konsisten.
4. *Materials* (Bahan)
Material merupakan bahan atau input fisik yang digunakan dalam proses produksi. Penataan material perlu dilakukan agar memperoleh bahan baku, sarana produksi, dan perlengkapan untuk menjaga kualitas dan kuantitas hasil.
5. *Machines* (Mesin)
Machines merupakan peralatan dan teknologi yang mendukung pekerjaan untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan. Indikator yang diperhatikan machines adalah mesin produksi, alat kerja, dan teknologi informasi.
6. *Market* (Pasar)
Market merupakan pihak yang menjadi penerima atau pengguna hasil program dan kegiatan. Yang menjadi indikatornya adalah konsumen, pengguna jasa, pemerintah, dan pemangku kepentingan

Tabel 2.1
Indikator Penataan Agroforestri

	Indikator	Sub Indikator	
Penataan	Lembaga	Struktur organisasi yang jelas	Indikator Kelembagaan Menurut Uphoff (1986)
		Fungsi dan peran lembaga	
		Kapasitas kepemimpinan	
		Keberlanjutan kelembagaan	
		Kejelasan kewenangan	Indikator Penataan Lembaga Menurut Grindle (1996)
		Koordinasi antar lembaga	
		Kapasitas administrasi	
	Efektivitas pelaksanaan kebijakan		
Manajemen	Man (Manusia)		

		Money (Uang)	<i>Principles of Management</i> (George R. Terry, 1953)
		Methods (Metode)	
		Materials (Bahan)	
		Machines (Mesin)	
		Market (Pasar)	
	Kelola	Akuntabilitas	LAN (Lembaga Administrasi Negara)
	Transparansi		
	Kepastian hukum		
	Profesionalisme		
	Efektivitas dan efisiensi		
Partisipasi			

Sumber : indikator penataan yang dioleh penulis (2025)

4. Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan

Pemberdayaan masyarakat memberikan dampak manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi atau non ekonomi) untuk menghindari kekecewaan anggota kelompok (Mulyana et al., 2022). Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 67 Tahun 2016 dirancang agar kelompok tani bukan sekadar perkumpulan biasa, melainkan menjadi lembaga yang mandiri, produktif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pemberdayaan merupakan sebuah upaya agar kelompok tani hutan mampu menjadi lembaga sesuai dengan amanat Permentan tersebut. Pemberdayaan berasal dari kata berdaya yang berarti memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menghadapi permasalahan. Melalui pemberdayaan petani anggota KTH, maka tingkat partisipasi petani dalam memanfaatkan sumber daya (hutan) juga semakin meningkat. Selanjutnya akses terhadap pemanfaatan sumber daya dan pembangunan juga akan meningkat dan pada akhirnya timbul kemandiriannya. Dengan demikian kebutuhan hidup petani akan lebih baik melalui usaha ternak yang dijalankannya dengan memanfaatkan sumber daya hutan di sekitarnya (Pranowojati et al., 2024).

Kelompok petani bisa disebut mandiri apabila sudah mampu menyelesaikan permasalahan secara mandiri. Kelompok tani disebut mandiri apabila sudah memiliki anggota yang berkompeten, sumber dana sendiri yang sudah stabil, memiliki sarana prasarana yang memadai, memiliki tujuan target pemasaran yang jelas serta memiliki usaha yang berkelanjutan. Kelompok tani yang mandiri sudah tidak memiliki ketergantungan kepada pihak lain untuk memberikan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan yang dimilikinya.

Pemberdayaan yang produktif harus memiliki struktur kepengurusan, tugas fungsi, program kerja, regulasi dan prosedur kerja yang jelas karena berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi usaha. Melalui struktur kepengurusan yang tertata akan memperjelas pembagian tugas dan proses pengerjaan lebih cepat dan produktif karena semua anggota mengerjakan tugas sesuai ketentuan. Penataan regulasi tentang program kerja, mekanisme dan prosedur

pengerjaan yang tepat juga akan memberi dampak produktif pada hasil kerja anggota kelompok.

Kriteria Produktif tidak terpisahkan dengan kesejahteraan karena kelompok tani yang produktif akan berbanding lurus dengan kesejahteraan anggota. Pemanfaatan hutan dengan produktif melalui program kerja dan metode yang tepat, pengelolaan keuangan kelompok, serta tujuan objek pemasaran hasil panen yang pasti dan berkelanjutan akan memberikan kesejahteraan pada anggota kelompok tani.

III. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif karena penulis menggunakan narasi dalam menjelaskan permasalahan yang diteliti dan menggambarkan situasi yang sedang terjadi di lapangan secara menyeluruh. Teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah observasi ke lokasi penelitian dan mewawancarai informan yang memiliki pemahaman dan keahlian tentang permasalahan yang diteliti atau memiliki kewenangan sehingga akan memudahkan penulis dalam menganalisis. Penentuan informan yang akan di wawancarai menggunakan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2013:218), "*purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu". Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui dokumen-dokumen Pemerintah Kabupaten Pasaman dan Provinsi Sumatera Barat secara *online* dan *offline*.

IV. Hasil Penelitian

Permasalahan yang dihadapi kelompok tani dalam pelaksanaan agroforestri di Kecamatan Panti

Kegiatan agroforestri menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dan memperoleh penghasilan. Kegiatan agroforestri mengalami beberapa kendala pelaksanaan. Permasalahan yang dihadapi kelompok tani tersebut adalah:

1. Pengetahuan masyarakat masih rendah.

Anggota kelompok hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang pertanian yang produktif, cara menjaga kawasan hutan maupun agroforestri yang benar karena belum diberikan banyak pembekalan, baik oleh penyuluh, dinas terkait yang berwenang maupun kelompok tani hutan lain.

2. Penyuluhan terkait perawatan masih tidak bisa dilaksanakan

Kelompok tani tidak bisa mendapatkan penyuluhan termasuk terkait perawatan karena dinas terkait tidak menyelenggarakan penyuluhan. Padahal menurut anggota kelompok tani, penyuluhan perawatan termasuk penting agar petani memiliki pengetahuan dalam menjaga dan merawat tanamannya sehingga bisa tumbuh optimal dan terbebas dari hama. Kelompok tani tidak bisa menyelenggarakan secara mandiri karena keterbatasan keuangan.

3. Petani masih memakai gaya bercocok tanam tradisional

Petani masih melaksanakan kegiatan dengan menggunakan metode tradisional. Hal ini berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi kegiatan karena proses pengolahan lahan dan pemeliharaan kopi menjadi lebih lama.

Penataan Agroforestri dalam pemberdayaan Kelompok Tani Hutan di Kecamatan Panti

Penataan agroforestri dilaksanakan untuk memperoleh hasil yang optimal. Menurut penulis, penataan yang perlu dilaksanakan adalah penataan kelembagaan, penata kelolaan dan penataan manajemen.

1. Penata kelembagaan

Menurut Uphoff (1986), indikator keberhasilan penataan kelembagaan adalah struktur organisasi yang jelas, fungsi dan peran lembaga, kapasitas kepemimpinan, keberlanjutan kelembagaan, kejelasan kewenangan, koordinasi antar lembaga, kapasitas administrasi, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Kelompok Tani Hutan Harapan Jaya Batu Ampar secara kelembagaan yang menjalankan kegiatan agroforestri sudah memiliki struktur organisasi yang terdiri dari penanggung jawab, ketua kelompok, sekretaris, dan bendahara. Struktur tersebut sudah mampu menjalankan fungsi kelompok tani. Tugas dan fungsi kelompok tani sudah diatur dalam kebijakan kelompok, yaitu mengubah hutan gundul dan semak belukar menjadi hutan yang produktif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku utama kegiatan agroforestri, serta memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan anggota kelompok.

Kelompok tani berperan membimbing masyarakat dan menjaga perilaku petani agar tidak melakukan perusakan hutan. Kelompok tani . Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok tani sebagai upaya melestarikan hutan adalah mewajibkan setiap anggota kelompok untuk wajib memiliki tanaman berakar tunggang. Akar tunggang mampu tumbuh dalam dan kuat, hal ini akan sangat berguna terutama daerah perbukitan atau lereng. Jaringan akar mampu

mengikat partikel tanah agar tidak terkikis aliran air atau angin sehingga mengurangi risiko banjir dan tanah longsor.

Ketua kelompok sudah memiliki kapasitas kepemimpinan karena memiliki rencana kegiatan sehingga kelompok memiliki kejelasan kegiatan dan tujuan organisasi. ketua kelompok juga dinilai anggota memiliki pengetahuan tentang pengolahan kopi dan sumber daya lain yang cocok untuk dibudidayakan oleh kelompok. Anggota kelompok juga mematuhi kebijakan yang dibuat oleh ketua kelompok. Contoh dari kepatuhan tersebut adalah anggota kelompok tidak melakukan penebangan hutan dan setiap anggota kelompok memiliki tanaman tegakan. Tanaman tegakan adalah sekumpulan pohon atau komunitas tumbuhan berkayu di areal tertentu yang memiliki keseragaman dalam komposisi jenis, struktur umur, dan kerapatan, serta berbeda dengan area sekitarnya. Kendala yang dihadapi adalah tidak semua anggota mengetahui apa saja anjuran dan larangan organisasi. Solusi yang dilaksanakan oleh kelompok adalah membuat kebijakan secara tertulis agar bisa dipedomani anggota serta melakukan sosialisasi dan rapat secara berkala.

Keberlanjutan kelembagaan kelompok tani masih belum bisa diprediksi saat ini. Kelompok tani masih berproses dan perlu diusahakan. Keberlanjutan kelembagaan berkaitan dengan kemampuan lembaga untuk bertahan, berfungsi, dan berkembang dalam jangka panjang. Keberlanjutan kelembagaan memiliki 3 dimensi, yaitu ekonomi, ekologi dan sosial (Ariandi, 2023). Kendala yang dihadapi kelompok tani pada sektor ekonomi adalah usaha yang belum berkembang dan masih membutuhkan bimbingan pada bagian produksi hingga pemasaran. Untuk mencari solusi dari permasalahannya, kelompok tani melakukan pertemuan rutin setiap dua bulan untuk membahas masalah, termasuk permasalahan petani seperti hama, pemakaian pestisida, pupuk dan berbagi ilmu dalam obrolan ringan di posko 2. Kelompok tani juga diagendakan rapat akhir tahun dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan. Sektor sosial tidak mengalami kendala karena anggota kelompok petani berpartisipasi dalam pengelolaan hutan serta pelaksanaan agroforestri tidak bertentangan dengan sosial budaya yang berlaku. meskipun demikian, kelompok tani masih memerlukan peningkatan dalam beberapa hal. Kelompok tani memerlukan lebih banyak pengetahuan dan pelatihan tentang pengembangan agroforestri dan bimbingan teknis cara pengolahan kopi agar hasil produksi memiliki kualitas yang baik. Pelatihan yang efektif berperan strategis dalam membantu petani mengakses informasi penting mengenai teknologi baru, praktik pertanian berkelanjutan, dan strategi pemasaran (Saputra et al., 2024). Kelompok tani saat ini juga belum mampu memproduksi kopi dalam jumlah besar sehingga belum bisa dipasarkan dalam skala besar. Kualitas dan kuantitas hasil produksi kopi dan kemampuan kelompok tani dalam

memasarkan hasil produksinya menjadi faktor yang menentukan keberlanjutan kelembagaan. Sektor ekologi tidak mengalami kendala karena kelompok petani melaksanakan program kegiatan yang mendukung pemeliharaan ekologi hutan di Kecamatan Panti.

Kelompok tani sudah membuat kebijakan yang mengatur tentang kejelasan kewenangan. Kelompok tani mengatur tentang penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Kelompok tani sudah membuat kebijakan yang mengatur tentang kejelasan kewenangan. Kelompok tani juga memiliki kewenangan pengelolaan lahan produksi termasuk penataan areal, pemanfaatan hasil dan pengaturan unit produksi. Kelompok tani juga mengatur tentang kemitraan kerja dan pembagian hasil produksi.

Kelompok Tani sudah berkoordinasi dengan lembaga terkait misalnya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Dinas Kehutanan. KPHL melaksanakan monitoring dan memastikan kegiatan berjalan dengan lancar. Kendala yang dihadapi kelompok ini adalah Dinas Pertanian masih belum terlalu aktif dalam membantu perkembangan petani. Misalnya ketika petani meminta penyuluhan perawatan tanaman kopi yang baik dan benar kepada KPHL, KPHL akan mengarahkan pada Dinas Pertanian sebab kopi adalah tanaman tani, sedangkan menurut Dinas Pertanian hal tersebut bukan kewenangannya karena lokasi penanaman kopi berada di kawasan hutan. Hal tersebut membuat petani kesulitan memperoleh akses untuk pelatihan dan penyuluhan. Permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan agroforestri dan memerlukan perhatian yaitu aspek teknis dan aspek sosial. Permasalahan ketersediaan sarana produksi dan modal (seperti : fasilitas, subsidi pupuk maupun benih) harus mendapat dukungan dari Dinas Pertanian setempat, karena walaupun usaha mereka berada di lahan hutan, namun memberikan kontribusi yang nyata di sektor pertanian (Mayrowani, 2011).

Kapasitas administrasi yang dilaksanakan oleh Kelompok tani sudah berjalan walaupun belum optimal. Kelompok tani sudah membuat perencanaan program kegiatan, pelaporan kegiatan serta laporan pengawasan kegiatan. Tetapi dokumen tersebut tidak tertata dengan rapi dan tempat penyimpanan yang tidak layak membuat dokumen tercecer atau hilang. Kelompok tani juga sudah mengelola sumber daya dengan baik dan mencatat seluruh aset yang dimiliki. Kebijakan dan program yang dibuat sudah dilaksanakan dan tetap dilakukan evaluasi secara berkala untuk perbaikan kegiatan selanjutnya.

Kebijakan yang dibuat oleh kelompok tani belum seluruhnya dijalankan dengan optimal. Sebagian kebijakan yang dibuat berdasarkan hasil rapat sudah di jalankan dengan baik, namun beberapa aturan yang menyangkut unit usaha kurang diperhatikan oleh

masyarakat karena beranggapan bahwa partisipasi anggota pada unit usaha kelompok tidak berdampak kepada mereka.

2. Penata kelolaan

Penulis menggunakan indikator menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) untuk mengukur penata kelolaan kelompok tani. Adapun indikator tersebut yaitu akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, profesionalisme, efektivitas dan efisiensi, serta partisipasi. Pengelolaan kelompok tani belum menerapkan asas akuntabilitas, karena tahapan pertanggungjawaban kegiatan masih berupa rencana yang belum terlaksana. Kelompok tani juga sudah memiliki kepastian hukum, karena pembentukan kelompok sudah memiliki legalitas dan pelaksanaan kegiatan sudah diatur dalam kebijakan kelompok tani. Anggota kelompok juga sudah mulai profesional untuk bertanggung jawab menyelesaikan setiap tugas dan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya.

Kelompok tani sudah mengolah kopi secara efektif, mulai dari penyediaan bahan baku, pengelolaan pasca panen, dan proses produksi karena setiap proses tersebut sudah dikerjakan oleh anggota sesuai keahliannya masing-masing berdasarkan SOP yang sudah ditetapkan oleh kelompok. Kelompok memiliki kendala ketika diperlukan produksi kopi dalam jumlah besar. Kendala tersebut, yaitu :

- a. Modal pembelian kopi masih kecil
Alternatif solusi modal usaha adalah kelompok tani difasilitasi oleh Dinas terkait untuk bekerja sama dengan pihak swasta ataupun program pinjaman lunak dari bank daerah untuk mengembangkan UMKM (Prihatini, Bukori, et al., 2022). Tetapi dalam pelaksanaannya akan terdapat kendala pada jaminan dan pihak penanggung jawab pinjaman tersebut.
- b. Pemasaran yang kurang baik karena kekurangan alat transportasi
Kelompok tani masih memiliki keterbatasan daerah tujuan pemasaran karena belum memiliki kendaraan operasional.
- c. Kualitas mesin giling kopi yang kurang baik.
Kualitas mesin yang kurang baik berpengaruh pada kemampuan kelompok tani memiliki kopi hasil produksi yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar.

Kelompok tani belum bisa melaksanakan kegiatan pengolahan kopi secara efisien karena masih menggunakan metode tradisional sehingga menjadi lebih lama. Keterbatasan pengetahuan petani dalam bertani membuat pengerjaan kegiatan lebih lama dan kurang produktif. Kelompok sudah menerapkan asas transparansi karena setiap kebijakan dan keputusan yang akan diambil dilaksanakan secara terbuka dalam rapat kelompok, termasuk pengumuman penggunaan uang kas.

3. Penata manajemen

Penulis menggunakan teori George R. Terry (1953) untuk melihat indikator yang perlu diperhatikan dalam penataan manajemen adalah

1) *Man* (Manusia)

Manusia dalam manajemen berkaitan dengan kualitas dan kuantitas. Anggota kelompok tani berjumlah 100 orang. Sedangkan kompetensi yang dimiliki anggota sudah cukup baik, yaitu pengelolaan lahan, perawatan tanaman kopi dan lainnya terkait perawatan kopi.

2) *Money* (Uang)

Kelompok tani belum memiliki kemandirian keuangan. Meskipun harga kopi sudah dikategorikan stabil dan baik tetapi pengurus kelompok tidak memberikan pajak kepada petani. Kelompok tani belum memberlakukan pembagian hasil karena kegiatan unit usaha belum berjalan dengan baik. Keuangan anggota juga masih lemah dan belum memiliki pemasukan yang memungkinkan untuk diberlakukan pembagian hasil. Seluruh pemasukan dan pengeluaran kelompok dicatat oleh bendahara dan diumumkan saat dilaksanakan rapat.

3) *Methods* (Metode)

Metode kerja yang digunakan oleh kelompok tani sudah terstruktur dan tersistematis. Kelompok tani sudah membuat SOP untuk setiap pelaksanaan kegiatan sehingga pekerjaan lebih terstruktur, sistematis, efektif dan efisien. Kelompok tani sudah membuat SOP pengolahan kopi.

4) *Materials* (Bahan)

Kualitas produk yang dihasilkan petani tergolong baik. Berdasarkan wawancara dengan pemilik warung kopi, pemilik warung kopi dan pembeli mengatakan bahwa rasa kopi sudah enak dan sudah sesuai dengan selera konsumen meskipun teksturnya masih kasar. Pemilik warung kopi menyarankan agar pengolahan kopi bisa lebih halus lagi.

5) *Machines* (Mesin)

Kelompok tani sudah memiliki beberapa peralatan penunjang pengolahan kopi tetapi kualitasnya belum terlalu baik. Alat penggiling kopi belum menghasilkan kopi dengan standar kehalusan yang diinginkan, sehingga belum mampu memenuhi harapan oleh konsumen. Hal ini berpengaruh pada keinginan pembeli untuk membeli kembali produk kelompok tani. Peralatan yang dimiliki kelompok tani juga belum bisa mengakomodir kebutuhan konsumen dalam jumlah besar.

6) *Market* (Pasar).

Pemasaran menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi kelompok tani. Kelompok tani sudah pernah mendistribusikan hasil panen kepada 20 warung kopi di kecamatan Panti dan Kecamatan Dua Koto. Rasa kopi enak dan sesuai dengan selera konsumen. Tetapi tidak ada permintaan kopi lagi karena terapung. Hal ini dikarenakan saat ini

Dampak pelaksanaan agroforestri terhadap pelestarian hutan di Kecamatan Panti

Kegiatan agroforestri yang sesuai dengan aturan akan memberi dampak positif bagi masyarakat dan hutan. Meskipun kegiatan agroforestri belum berjalan dengan optimal tetapi sudah memberikan manfaat bagi masyarakat. Masyarakat memiliki alternatif pekerjaan dalam situasi kesulitan memperoleh pekerjaan dan penghasilan. Agroforestri juga memberikan dampak pada hutan yang dikelola. Dampak agroforestri bagi hutan di Kecamatan Panti adalah kelompok tani memiliki kepedulian terhadap pelestarian hutan, salah satu upaya yang dilaksanakan adalah kelompok tani membuat program rehabilitasi hutan dalam kegiatan agroforestri. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota kelompok tani, disampaikan bahwa KTH, KUPS dan tokoh Masyarakat bersama dinas terkait akan dilaksanakan kegiatan perawatan rehap hutan lindung pada tahun 2026. Jenis pohon yang akan digunakan dalam kegiatan rehab hutan lindung adalah pohon alpukat, durian, jengkol, kayu manis dan kopi.

Kelompok tani menjadwalkan kegiatan patroli hutan. Kelompok tani diberikan amanah untuk mengelola dan memiliki tanggung jawab menjaga kawasan hutan, secara bergantian melaksanakan patroli untuk mencegah aktivitas ilegal yang merusak Kawasan hutan. Kelompok tani akan dimintai pertanggung jawaban atas kegiatan perusakan hutan walaupun bukan anggota kelompoknya. Berdasarkan wawancara dengan petani, diketahui bahwa petani tidak melakukan tindakan langsung apabila ditemukan kegiatan yang mencurigakan tetapi melaporkan kepada polisi kehutanan. Hal ini dilakukan untuk mencegah konflik dan petani juga tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum seperti penangkapan dan penyelidikan. Kelompok tani hutan dan tokoh Masyarakat didampingi dinas terkait juga melakukan pengawasan zonasi untuk memantau pemanfaatan lahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Petani melakukan pengamanan kawasan hutan dengan menetapkan daerah hutan larangan perkebunan. Kelompok tani dan petani harus memastikan pohon asli hutan tumbuh dengan baik dan tidak terganggu dengan aktivitas agroforestri. Karena secara konseptual,

kegiatan agroforestri tidak mengganggu fungsi utama hutan. petani akan diberikan teguran apabila ditemukan kegiatan yang mengganggu pohon dan hutan.

V. Kesimpulan

Permasalahan yang dihadapi kelompok tani dalam pelaksanaan agroforestri di Kecamatan Panti adalah pengetahuan masyarakat masih rendah, penyuluhan terkait perawatan masih tidak bisa dilaksanakan, dan petani masih memakai gaya bercocok tanam tradisional. Penataan Agroforestri dalam pemberdayaan Kelompok Tani Hutan di Kecamatan Panti adalah penata kelembagaan, penata kelolaan, dan penata manajemen. Permasalahan yang dihadapi pada aspek penata kelembagaan adalah keberlanjutan kelembagaan masih berproses dan belum diketahui karena masih terkendala pada aspek pemasaran dan keuangan lembaga. Sedangkan hal yang perlu ditata pada aspek penata kelolaan adalah kelompok tani belum menerapkan indikator akuntabilitas karena kurang tertib administrasi. Pelaksanaan agroforestri juga belum efektif dan efisien karena kurangnya pengetahuan dan masih menggunakan metode kerja tradisional. Kelompok tani memiliki banyak tugas dalam penataan manajemen karena kelompok tani masih memiliki kelemahan pada kompetensi anggota kelompok, keuangan kelompok tani belum mandiri, fasilitas penunjang pengolahan kopi kurang mumpuni yang berdampak pada kesulitan untuk mengakomodir apabila ada konsumen yang membutuhkan kopi dalam jumlah besar, serta kelompok tani belum menemukan target pasar yang tepat.

Meningkatkan kompetensi petani tentang agroforestri, bekerja sama dengan kelompok tani sekitar untuk membuat kegiatan penyuluhan, serta mulai menerapkan metode kerja yang modern dan produktif. Kelompok tani lebih disiplin dalam hal tertib administrasi untuk pertanggung jawaban dan menghitung progres kegiatan. Kelompok tani juga perlu membuat strategi pemasaran agar penjualan hasil produksi lebih banyak dan menguntungkan yang berpengaruh pada kemandirian keuangan dan keberlanjutan lembaga kelompok tani. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan agroforestri secara berkala untuk mencegah ada kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariandi, R. (2023). Strategi Keberlanjutan Agroforestry Di Desa Ulusaddang Kabupaten Pinrang= Agroforestry Sustainability Strategy In Ulusaddang Village Pinrang Regency. *Journal of Forestry Research*, 6(2), 74–88. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/18609/2/M012202015_tesis_29-08-2022_1-2.pdf
- Diny, S. M., Wardaya, W., & Hendrati, I. M. (2025). Upaya Penguatan Kelembagaan Pasca Izin Perhutanan Sosial Kelompok Tani HKm Ulusena di Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat (Pamas)*, 9(4), 441–452.

<https://doi.org/10.52643/pamas.v9i4.5685>

- Dirga, A. S., & Djafar, T. (2023). Implementasi Penanggulangan Bencana Studi Kasus Nagari Siaga Bencana (Nagasina) Di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 106–122.
- Fada, H. L. N. (2022). I . Pendahuluan Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai suku dan budaya yang berkembang di setiap daerah (Nurcahyanti et al ., 2020). Produk-produk kebudayaan pun beraneka ragam , baik kebudayaan dalam bentuk gagasan , aktivitas , maupun artefak. *Maret, Universitas Sebelas Surakarta, Kota Tengah, Jawa Pemerintah, Kebijakan Masyarakat, Partisipasi*, 7, 1–19.
- Golar, G., Muis, H., & Ali, M. N. (2017). Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Hutan Lindung: Penerapan Skema Perhutanan Sosial di Desa Namo. *Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Hutan Lindung: Penerapan Skema Perhutanan Sosial Di Desa Namo*, 16(1), 51–59.
- Hardinata, M. A., Suryaningsih, E., Sari, V., & Khair, O. I. (2025). Strategi Manajemen Pemasaran Kopi Robusta oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Kota Guring, Lampung Selatan. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum*, 2(4), 244–249.
- Masthurri, M., & Muslih, A. M. (2023). Evaluasi Dukungan Masyarakat Terhadap Keberhasilan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Ie Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 8(2), 606–619.
- Mayrowani, H. (2011). Pengembangan agroforestry untuk mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan petani sekitar hutan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 29(2), 83–98. <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/fae/article/view/3543>
- Mulyana, M., Pawan, A. P., & Maabuat, E. E. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Tondok Bakaru Di Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 16–32.
- Pranowojati, D., Dasipah, E., Sukmawati, D., Pangan, D. K., Pertanian, D., & Bandung, K. (2024). The Role of Empowering Members of Forest Farmer Groups (KTH) and Institutions on the Success of Honey Bee Farming Businesses and Their Impact on Community Participation in Forest Conservation in Garut Regency. *Journal of Innovation and Research in Agriculture*, 3(1), 29–39.
- Prihatini, J., Bukori, A., Rifai, M., Kabupaten, B., & Timur, K. (2022). *KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Pendahuluan Indonesia dengan luas perairan hampir tiga kali luas daratan memiliki potensi yang besar dari sektor perikanan , baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya . hasil alam yang ada , salah satunya dari sektor pe.* 7(November), 49–71.
- Prihatini, J., Elungan, P. C., & Rifai, M. (2022). Pemberdayaan Kelompok Nelayan melalui Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Desa Dalam Kepulauan Talaud (Studi Kelompok Nelayan pada Koperasi Teluk Lawasan Indah). *Jurnal Pemangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 7, 20–44.
- Saputra, R., Rahman, D., & Sultani. (2024). Manajemen Pelatihan dalam Penguatan Kelompok Tani pada Pelaku Agribisnis Inklusif: Tinjauan Literatur. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 10317–10326. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Waskitho, N. T. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Khdtk Umm Dalam Konservasi Kawasan Hutan Melalui Sistem Agroforestri. *Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 1–9. <https://doi.org/10.29040/budimas.v4i2.6052>

Zahra, Salwa Azuma and Pratama, Agief Julio and Situmeang, W. H. (2024). Zahra, Salwa Azuma and Pratama, Agief Julio and Situmeang, Widya Hasian. *Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Dalam Upaya Pengembangan Usahatani Urban Farming (Kasus Kelompok Tani Mugi Lestari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, 21(2), 212–224.*



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).